

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025

Periode: Oktober – Desember 2025



**DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV tahun 2025 Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi serta pengungkapan hasil kinerja selama masa Triwulan IV Tahun 2025 atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan amanat yang diberikan kepada Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan Laporan Kinerja ini menyajikan progress keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Triwulan IV tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada periode selanjutnya.

Semoga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan IV tahun 2025 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, Januari 2026

Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Jaminan Produk Halal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
BAB I PENDAHULUAN.....	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1. Maksud	5
2. Tujuan	5
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	9
B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT).....	10
C. PERJANJIAN KINERJA (PK)	12
D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK).....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI.....	22
B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN	61
C. HIGHLIGHT KINERJA	62
BAB IV PENUTUP	72
LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal merupakan salah satu unit organisasi Eselon I di BPJPH yang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi.

Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang merupakan Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang memiliki kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal, maka BPJPH mempunyai visi besar di tahun 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam mendukung pencapaian visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menetapkan 2 (dua) sasaran program yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal; dan 2) Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal. Sasaran program tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH; dan 2) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal. Sasaran kegiatan meningkatnya pembinaan lembaga JPH dan SDM Halal menjadi tanggung jawab bagi unit kerja Direktorat Bina Jaminan Produk Halal. Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal menjadi tanggung jawab bagi unit kerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti memiliki capaian kinerja sebesar 100%, sehingga dapat dikategorikan SANGAT BAIK. Indikator kinerja kedua yaitu persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH memiliki capaian kinerja sebesar 5,25%. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja pertama yaitu persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya telah memiliki realisasi dengan capaian kinerja sebesar 60%. Indikator kinerja kedua yaitu persentase SDM Halal yang berkompeten memiliki capaian kinerja sebesar 60%. Indikator kinerja ketiga yaitu persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal memiliki capaian kinerja sebesar 60%.

Sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 70,7% yang telah melampaui target tahun 2025. Indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 70%. Indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya memperoleh capaian kinerja sebesar 70%.

Sasaran kegiatan dari Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 5 (lima) indikator kinerja. Indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar memperoleh capaian kinerja sebesar 17%. Indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 80%. Indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 76,11%. Mayoritas capaian dari indikator kinerja triwulan IV tahun 2025 dari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah melampaui target tahun 2025.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting digunakan sebagai masukan bagi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH dalam perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Laporan Kinerja Triwulan dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran untuk mencapai sasaran/target yang telah dituangkan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025

2. Tujuan

Laporan kinerja Triwulan IV Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan

jaminan produk halal . BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. BPJPH terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan dari peraturan tersebut dan upaya efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal maka dibuatlah Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut merupakan dasar dari terbentuknya Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal di BPJPH.

Struktur organisasi dari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal terdiri dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal yang masing-masing memiliki subdirektorat di bawahnya. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH. Sedangkan, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang pengawasan JPH yang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait JPH.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal membawahi dua direktorat utama:

1. Direktorat Pembinaan JPH

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

2. Direktorat Pengawasan JPH

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

3. Fungsi Pendukung

- a. Tata Usaha Deputy: Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan anggaran)
- b. Tim Teknis dan Kelompok Kerja: Mendukung pelaksanaan program strategis, evaluasi, dan pelaporan.

4. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki adalah sebanyak 43 Pegawai terdiri dari 32 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 11 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

5. Anggaran

Anggaran bersumber dari APBN sesuai DIPA Nomor: SP DIPA-142.01.1.693733/2025 yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2025 sebesar Rp.20.015.965.000,- (Dua puluh miliar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah.)

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan pada Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan terkait latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan dan struktur organisasi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Tujuan dan Sasaran Program, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait capaian kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, pengukuran kinerja dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja, kendala, serta rencana dan tindak lanjut.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

BPJPH berkomitmen mendukung visi Pembangunan Nasional yang diamanatkan dalam misi Presiden yang menjadi Prioritas Nasional. BPJPH berperan dalam mewujudkan Prioritas Nasional kedua (PN-2) yang menitikberatkan pada kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi syariah. Di sisi lain, BPJPH perlu memastikan legalitas hukum agama dalam proses sertifikasi produk halal, untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu mendukung Prioritas Nasional Kedelapan (PN-8) yaitu terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat. Dalam konteks ini, BPJPH bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem Jaminan Produk Halal yang kokoh sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi syariah di dalam negeri. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2025–2029 menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra Sekretariat Utama. Visi BPJPH disusun selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 serta Visi Indonesia 2045, yaitu: **“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, Sumber Daya Manusia (SDM) halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi BPJPH, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung misi pertama BPJPH yaitu: **“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan**

Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan” Untuk mewujudkan misi tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh “tingkat literasi produk dan jasa halal”.

BPJPH telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH pada tahun 2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- **Tujuan 1:** Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- **Tujuan 2:** Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
- **Tujuan 3:** Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan sasaran strategis meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- **Tujuan 4:** Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keempat sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH berperan dalam mencapai tujuan 2, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Adapun indikator maupun ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

- 1) Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
- 2) Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), penetapan rencana capaian atau target indikator kinerja berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. RKT disusun sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran. RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran, dan target yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Adapun RKT Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**RENCANA KINERJA TAHUNAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL**

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
			b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
		Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
			b Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
			c Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%
2	Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
			b Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang	100%

NO.	UNIT KERJA	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	
			c Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
			d Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
			e Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%
3	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal	Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			b Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
			c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

B. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra BPJPH tahun 2025-2029 dan DIPA BPJPH Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar 10.922.419.000,- (Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu), Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis

yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan unit kerja dibawahnya, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%
		b	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%
2	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal	a	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%
		b	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%
		c	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 2 (dua) sasaran program dengan indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT BINA JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
		b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%
		c	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Bina Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		b	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%
		c	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%
		d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%
		e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal pada tahun 2025 menetapkan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja dan target sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaannya.

C. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Deputi beserta anggarannya. Adapun RAPK yang ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET										ANGGARAN												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10		B11	B12										
		Persentase rekayasa hasil pengemasan JPH yang ditindaklanjuti												100%		6.983.603.000									
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					A. Fasilitas Penyelidikan Dukungan Laboratorium Halal G. Pelatihan PPC I. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal J. Penelitian, Pengujian dan Sertifikasi Kompetensi bagi Personel Laboratorium K. Kalibrasi, Pengujian Laboratorium Halal L. Fasilitas Tugat dan Ruang Laboratorium Halal M. Konstruksi Laboratorium Pengujian Halal N. Pengembangan (P3H) (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) O. Tesis, Wicara Pengembangan kepada Lembaga P. Rajat Konfirmasi Pengemasan JPH A. Pengembangan Terpadu Mandiri Halal B. Pengembangan kepada Pelaku Usaha (Berlainsa Pengasin Daerah) D. Rujut Fasilitas Implementasi Pengembangan Terpadu dengan K/L E. Pengembangan Implementasi Fasilitas Layanan Sertifikasi Halal Berlainsa K/L, vertikal														278.600.000 41.185.100 320.370.000 94.400.000 175.000.000 311.158.000 191.380.000 247.685.000 1.978.605.000 19.021.000 851.534.000 697.106.000 643.262.000 1.681.327.000
		7161.01C.002, SOM Halal yang Mendapatkan Pengemasan JPH				001, Pengembangan kepada SOM Halal																			
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					B. Inovasi dan Jalinan Rujutasi Pengasin JPH C. Pembiayaan dan Us Komunitas Catur Pengasin JPH D. Peningkatan Teknis Pengembangan JPH bagi Pengasin Daerah E. Sosialisasi Pedoman Pengembangan JPH F. G3H45 Pengasin Daerah H. Pengasin JPH Berasap/berbau Berasap Pengasin Daerah C. Pengembangan Tindakan Lanjut Asasin Masyarakat (B3PH, K/L Lain, Sertifikasi Daerah)														86.871.000 119.160.000 347.515.000 120.885.000 238.085.000 297.265.000 329.054.000
		7161.01C.002, SOM Halal yang Mendapatkan Pengemasan JPH				001, Pengembangan kepada SOM Halal																			
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					B. Inovasi dan Jalinan Rujutasi Pengasin JPH C. Pembiayaan dan Us Komunitas Catur Pengasin JPH D. Peningkatan Teknis Pengembangan JPH bagi Pengasin Daerah E. Sosialisasi Pedoman Pengembangan JPH F. G3H45 Pengasin Daerah H. Pengasin JPH Berasap/berbau Berasap Pengasin Daerah C. Pengembangan Tindakan Lanjut Asasin Masyarakat (B3PH, K/L Lain, Sertifikasi Daerah)														86.871.000 119.160.000 347.515.000 120.885.000 238.085.000 297.265.000 329.054.000
		7161.01C.002, SOM Halal yang Mendapatkan Pengemasan JPH				001, Pengembangan kepada SOM Halal																			
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					B. Inovasi dan Jalinan Rujutasi Pengasin JPH C. Pembiayaan dan Us Komunitas Catur Pengasin JPH D. Peningkatan Teknis Pengembangan JPH bagi Pengasin Daerah E. Sosialisasi Pedoman Pengembangan JPH F. G3H45 Pengasin Daerah H. Pengasin JPH Berasap/berbau Berasap Pengasin Daerah C. Pengembangan Tindakan Lanjut Asasin Masyarakat (B3PH, K/L Lain, Sertifikasi Daerah)														86.871.000 119.160.000 347.515.000 120.885.000 238.085.000 297.265.000 329.054.000
		7161.01C.002, SOM Halal yang Mendapatkan Pengemasan JPH				001, Pengembangan kepada SOM Halal																			
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					B. Inovasi dan Jalinan Rujutasi Pengasin JPH C. Pembiayaan dan Us Komunitas Catur Pengasin JPH D. Peningkatan Teknis Pengembangan JPH bagi Pengasin Daerah E. Sosialisasi Pedoman Pengembangan JPH F. G3H45 Pengasin Daerah H. Pengasin JPH Berasap/berbau Berasap Pengasin Daerah C. Pengembangan Tindakan Lanjut Asasin Masyarakat (B3PH, K/L Lain, Sertifikasi Daerah)														86.871.000 119.160.000 347.515.000 120.885.000 238.085.000 297.265.000 329.054.000
		7161.01C.002, SOM Halal yang Mendapatkan Pengemasan JPH				001, Pengembangan kepada SOM Halal																			
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					B. Inovasi dan Jalinan Rujutasi Pengasin JPH C. Pembiayaan dan Us Komunitas Catur Pengasin JPH D. Peningkatan Teknis Pengembangan JPH bagi Pengasin Daerah E. Sosialisasi Pedoman Pengembangan JPH F. G3H45 Pengasin Daerah H. Pengasin JPH Berasap/berbau Berasap Pengasin Daerah C. Pengembangan Tindakan Lanjut Asasin Masyarakat (B3PH, K/L Lain, Sertifikasi Daerah)														86.871.000 119.160.000 347.515.000 120.885.000 238.085.000 297.265.000 329.054.000
		7161.01C.002, SOM Halal yang Mendapatkan Pengemasan JPH				001, Pengembangan kepada SOM Halal																			
		NO	RINCIAN OUTPUT			KOMPONEN					SUB KOMPONEN														
1	Meningkatnya kualitas pengemasan Jaminan Produk Halal	7161.01C.001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal				001, Lembaga yang Mendapatkan Pengemasan Jaminan Produk Halal					B. Inovasi dan Jalinan Rujutasi Pengasin JPH C. Pembiayaan dan Us Komunitas Catur Pengasin JPH D. Peningkatan Teknis Pengembangan JPH bagi Pengasin Daerah E. Sosialisasi Pedoman Pengembangan JPH F. G3H45 Pengasin Daerah H. Pengasin JPH Berasap/berbau Berasap Pengasin Daerah C. Pengembangan Tindakan Lanjut Asasin Masyarakat (B3PH, K/L Lain, Sertifikasi Daerah)														86.871.000 119.160.000 347.515.000 120.885.000 238.085.000 297.265.000 329.

[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	2. 7161.CDC.001.SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	051. Sumber Daya Manusia yang terbiasa	B. Edukasi Halal (Halal Goes to Campus)												ANGGARAN
				TARGET												
1	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH	c. Persentase Petaku Usaha yang mengikuti pembinaannya setelah dilakukan pembinaan	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	70%	5.087.536.000		
		1. 7161.CDC.001.SDM yang mendapatkan pembinaan jaminan Produk Halal	051. Sumber Daya Manusia yang terbiasa		A. Literasi Seder Mula Bagi Kelompok Masyarakat				45,50%					5.087.536.000		
TOTAL														16.035.985.000		

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Bina Jaminan Produk Halal



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN	
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Memangulnya keaktifan hasil pengamatan lembaga JPH dan SDM halal	a. Penentaa laporan dan temuan hasil pengamatan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi			24,17%				55,83%		70,83%			100%	4.892.280.000	
		NO	SUB KOMPONEN													
			KOMPOEN													
			RINCIAN OUTPUT													
		1.	7141.002.001. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
	2. 7141.002.002. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													247.981.000		
		3. 7141.002.003. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												1.979.800.000		
		4. 7141.002.004. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												19.031.000		
		5. 7141.002.005. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												643.262.000		
		6. 7141.002.006. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												1.483.327.000		
1	Memangulnya keaktifan hasil pengamatan lembaga JPH dan SDM halal	b. Penentaa laporan dan temuan hasil pengamatan produk uaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi			24,17%				84,87%		88,67%			100%	1.048.830.000	
		NO	SUB KOMPONEN													
			KOMPOEN													
			RINCIAN OUTPUT													
		1.	7141.002.001. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan JPH													
		2. 7141.002.002. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan JPH												697.106.000		
1	Memangulnya keaktifan hasil pengamatan lembaga JPH dan SDM halal	c. Penentaa laboratorium pengawasara JPH yang memenuhi standar			5%				10%		13%			17%	1.042.739.000	
		NO	SUB KOMPONEN													
			KOMPOEN													
			RINCIAN OUTPUT													
		1.	7141.002.001. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal													
		2. 7141.002.002. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												41.181.000		
		3. 7141.002.003. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												94.402.000		
		4. 7141.002.004. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												125.900.000		
		5. 7141.002.005. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												312.114.000		
		6. 7141.002.006. Lembar yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal												191.390.000		
1	Memangulnya keaktifan hasil pengamatan lembaga JPH dan SDM halal	d. Penentaa SDM halal yang mematuhi regulasi pengawasara JPH			14,88%				68,25%		73%			80%	554.921.000	
		NO	SUB KOMPONEN													
			KOMPOEN													
			RINCIAN OUTPUT													

lembaga JPH dan SDN Halal	7151.DIC.001. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	751. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	H. Pengawasan Jatah Penyelenggaraan (Bersama Pengawas Daerah)										297.865.000		
	1.	7151.DIC.002. SDN Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	751. Pengawasan kepada SDN Halal	C. Pengawasan Teknik Lanjut Adnan Masyarakat (BSPM, K/L, Lain, Segin Daerah)										259.956.000	
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET										ANGGARAN	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Meningkatnya Kualitas Hasil pengawasan lembaga JPH dan SDN Halal	e. Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan		30%										75%	942.828.000
		PINCIAN OUTPUT		KOMPONEN										SUB KOMPONEN	
		NO													
		7151.DIC.001. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal		751. Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal											
		1.		B. Harmonisasi Jabatan Fungsional Pengawas JPH										86.873.000	
				C. Pembekalan dan Uji Kompetensi Calon Pengawas JPH										119.160.000	
				D. Pembekalan Teknis Pengawasan JPH bag. Pengawas Daerah										367.215.000	
				E. Sosialisasi Perilaku Pengawasan JPH										230.887.000	
				F. Dilat Pengawas Daerah										238.082.000	
				TOTAL										8.483.144.000	

Jakarta, 5 Februari 2025
Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal,



[Signature]
Muhammad Setyo Hartono

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPJPH. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DEPUTI

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan disahkan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Capaian ini berfungsi untuk mengukur keberhasilan setiap indikator dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IK
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$
Baik	$=100\%$
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$
Kurang	$<70\%$

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah melakukan kegiatan guna tercapainya sasaran program antara lain sebagai berikut :

1. **Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Pengawasan Jaminan Produk Halal**
 - a. **Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan IV (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	a Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	100%	322 tindak lanjut rekomendasi	322 tindak lanjut rekomendasi	100%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi Hasil Pengawasan JPH adalah tindak lanjut dari hasil pengawasan berupa saran, instruksi, atau arahan tertulis yang dikeluarkan oleh BPJPH kepada pihak yang diawasi berdasarkan temuan hasil pengawasan. Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti adalah jumlah dari total rekomendasi hasil pengawasan JPH yang telah mendapatkan tindak lanjut. Semakin tinggi rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti maka semakin tinggi efektivitas pengawasan Jaminan Produk Halal yang berimplikasi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap produk halal yang beredar di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 100% atau sebanyak 322 rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan sudah di realisasikan sebesar 322 rekomendasi yang ditindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan dari kegiatan pengawasan dengan capaian sebesar 100%. Pengukuran terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi berasal dari kegiatan Pengawasan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Pengawasan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Pengawasan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dan Pengawasan kepada pelaku usaha dan produk.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan JPH telah ditetapkan target sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Target untuk Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 322 tindaklanjut rekomendasi atau sebesar 100%. Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 322 tindaklanjut rekomendasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti	Target	0	100%	100%	100%
	Capaian	0	100%	100%	100%

Capaian pada triwulan IV telah melampaui target yang ditetapkan, serta capaiannya sama dengan triwulan II dan triwulan III.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi hasil Pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut:

- a) pengawasan pelaku usaha dan produk;
- b) pengawasan LPH;
- c) pengawasan LP3H; dan
- d) pengawasan P3H.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- i. terdapat ketidaksesuaian data antara profil awal saat pendaftaran sertifikat halal dengan kondisi terkini di lapangan. Belum terlaksananya pemutakhiran data (data update) secara berkala mengakibatkan informasi operasional pelaku usaha menjadi tidak akurat dan tidak relevan dengan kondisi riil saat pengawasan;

- ii. belum terdapat daftar lembaga dan SDM halal yang telah dilakukan pengawasan, sehingga mengalami kesulitan untuk menentukan target Lembaga dan SDM yang dilakukan pengawasan; dan
- iii. belum adanya fasilitas yang digunakan untuk SDM atau lembaga melaporkan hasil tindak lanjut pengawasan yang direkomendasikan oleh pengawas JPH.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi:

- i. mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan setiap perubahan signifikan (seperti perubahan bahan baku, lokasi fasilitas, atau manajemen) melalui sistem informasi secara real-time. Ketentuan ini dapat diperkuat dengan regulasi bahwa kegagalan melaporkan perubahan data dapat memengaruhi status validitas sertifikat halal;
- ii. melakukan sinkronisasi data SIHALAL untuk menyusun masterlist profiling Lembaga dan SDM Halal, sehingga penentuan target pengawasan tahunan dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan skala prioritas dan tingkat risiko; dan
- iii. membangun fitur modul "Monitoring Tindak Lanjut" pada sistem informasi pengawasan sebagai fasilitas bagi lembaga atau SDM untuk mengunggah bukti perbaikan atas rekomendasi pengawas secara daring dan terintegrasi.

b. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan IV (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal	b Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%	1120 Pelaku Usaha/ Lembaga	98 Pelaku Usaha/ Lembaga	5,25%

- 1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga Terhadap Penyelenggaraan JPH

Kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH adalah suatu kondisi di mana pelaku usaha dan lembaga JPH (LPH dan LP3H) yang memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Persentase kepatuhan Pelaku Usaha dan Lembaga terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat ketaatan pelaku usaha dan lembaga dalam memenuhi peraturan perundang-undangan dan sistem Jaminan Produk Halal. Kepatuhan dinilai berdasarkan hasil kegiatan pengawasan JPH. Semakin tinggi persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga, maka semakin efektif pengawasan JPH. Hal ini dapat mengurangi potensi pelanggaran dan risiko ketidaksesuaian terhadap standar halal dan menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap produk halal di Indonesia. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60%. Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah mencapai 98 pelaku usaha/lembaga dengan capaian kinerja sebesar 5,25%. Capaian ini merupakan hasil evaluasi terhadap ketaatan SDM halal dalam mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Total Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga yang telah dilakukan perhitungan triwulan I sampai pada triwulan IV adalah sejumlah 43,34 %.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 1120 Pelaku Usaha/Lembaga pada akhir tahun 2025. Realisasi triwulan IV tahun 2025 telah tercapai sebanyak 98 pelaku usaha dengan capaian kinerja sebesar 5,25%, namun belum memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 60% berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	Target	0	30%	45%	60%
	Capaian	0	27,96%	10,16%	5%

Pada Triwulan IV tahun 2025, indikator belum memenuhi target yang telah ditentukan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan IV. Capaian triwulan IV kurang dari yang target dan capaian triwulan II dan triwulan III.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya target pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) melakukan analisis kepatuhan terhadap hasil pengawasan lembaga; dan
- b) melakukan analisis kepatuhan hasil pengawasan SDM.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terintegrasinya secara sempurna data aktivitas pendampingan di lapangan dengan sistem penilaian kepatuhan, sehingga sulit mengukur apakah P3H benar-benar melakukan verifikasi fisik atau hanya sekadar administratif; dan
- ii. kendala dalam memverifikasi keaslian dokumen pendukung (seperti foto kunjungan atau pernyataan pelaku usaha) yang diunggah oleh P3H, yang berpotensi menyebabkan bias dalam hasil penghitungan kepatuhan.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. menyusun instrumen penilaian kepatuhan P3H yang mencakup aspek kedisiplinan waktu, akurasi dokumen, dan pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai dasar penghitungan yang objektif; dan

- ii. membangun sistem pemantauan real-time yang secara otomatis menghitung skor kepatuhan P3H berdasarkan performa harian untuk memudahkan penentuan target pembinaan bagi P3H dengan nilai kepatuhan rendah.

2. **Sasaran Program Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal**

a. **Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kinerjanya**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan IV (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	a Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%	120 Lembaga	120 Lembaga	60%

1) **Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga JPH yang Meningkatkan Kerjanya**

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari LPH, LP3H, dan LPP JPH. Jumlah lembaga penyelenggara JPH yang menunjukkan peningkatan kinerja dinilai berdasarkan skor peningkatan kinerja lembaga dalam kurun waktu satu tahun. Semakin tinggi tingkat literasi halal, semakin baik pula pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal serta semakin besar keterlibatan mereka dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga. Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya sudah terdapat realisasi sebesar 120 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 60%. Pada triwulan IV, dilakukan kegiatan yang menunjang tercapainya target akhir antara lain sebagai berikut : 1) pembinaan LP3H; 2) registrasi LP3H dan registrasi P3H; 3) evaluasi pembinaan dan rapat koordinasi LPH; dan 4) evaluasi visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH. Capaian ini dilakukan terhadap antara lain sebagai berikut :

- a) LPH yang meningkat kinerjanya

- i. LPH LPPOM
 - ii. LPH PT Surveyor Indonesia
 - iii. LPH Quality Syariah
 - iv. LPH BBSPJI Kerajinan dan Batik
 - v. LPH UIN Alauddin Makassar
 - vi. LPH Equitrust Lab
 - vii. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik
 - viii. LPH Zamzami
 - ix. LPH SAIZU
 - x. LPH Mujahidin
 - xi. LPH Almahyra
 - xii. LPH Wildanun Mukhalladun
 - xiii. LPH BSPJI Samarinda
- b) Lembaga Pendamping Proses Produk Halal yang meningkat kinerjanya berdasarkan peningkatan capaian sertifikat halal pada bulan Desember Tahun 2025
- i. Al Baitul Izzah
 - ii. Al Jam'iyatul Washliyah
 - iii. Al Muhajirin Al Hakim
 - iv. As-Syafi'iyah Halal Center
 - v. Datokarama Halal Center
 - vi. Edukasi Wakaf Indonesia
 - vii. Fatayat Nu Prov Kaltara
 - viii. Forum Zakat
 - ix. Gp Ansor Lampung
 - x. Halal Center Qur'Ani A-Syarichin
 - xi. Halal Center Al Hidayah
 - xii. Halal Center Al-Furqon
 - xiii. Halal Center Al-Raudah
 - xiv. Halal Center Cendekia Muslim - Ypcm
 - xv. Halal Center Iain Kendari
 - xvi. Halal Center Iain Pontianak
 - xvii. Halal Center Inisnu

- xviii. Halal Center Insanul Kamil
- xix. Halal Center Lembaga Pendidikan Dan Sosial Al Hidayah
- xx. Halal Center Pcnu Depok
- xxi. Halal Center Politeknik Aka Bogor
- xxii. Halal Center Pondok Pesantren Alhamdulillah Geger Kedungadem
Bojonegoro
- xxiii. Halal Center Salimah
- xxiv. Halal Center Uin K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- xxv. Halal Center Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- xxvi. Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar
- xxvii. Halal Center Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (Ump)
- xxviii. Halal Center Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus)
- xxix. Halal Center Yayasan Anwarul Hidayah (Yahida)
- xxx. Halal Center Yayasan Kbls Hodijah Cianjur
- xxxi. Halal Center Yayasan Widya Gara
- xxxii. Halal Centre Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan
- xxxiii. Halal Hero Ibnu Chaldun
- xxxiv. Halal Hub Pinbuk Indonesia
- xxxv. Hc Ums Rappang
- xxxvi. Iai An-Nadwah Kuala Tungkal
- xxxvii. Iain Bone
- xxxviii. Iain Fattahul Muluk Papua
- xxxix. Iain Palangkaraya
- xl. Iain Ternate
- xli. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia
- xl.ii. Ikatan Pondok Pesantren Indonesia
- xl.iii. Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara
- xl.iv. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Madura
- xl.v. Institut Sains Dan Teknologi Nasional
- xl.vi. Institut Teknologi Kalimantan
- xl.vii. Institut Teknologi Sumatera
- xl.viii. Ittihadul Mubahlighin Wal Muballighat
- xl.ix. Khutoba Indonesia
- I. Lembaga Pendamping Pph Halal Center Universitas Negeri Malang

- li. Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Muhammadiyah Magelang
- lii. Lembaga Pph Halal Center Syarikat Islam
- liii. Lp3h Bpsh Kahmi
- liv. Lp3h - Halal Center Universitas Darunnajah
- lv. Lp3h Al Ittihadiyah
- lvi. Lp3h Galunggung
- lvii. Lp3h Hidayatullah
- lviii. Lp3h lai Miftahul Ulum Lumajang
- lix. Lp3h lain Sultan Amai Gorontalo
- lx. Lp3h Life Skill Daarun Najaah
- lxi. Lp3h Madiq Riyadlul Qori'in
- lxii. Lp3h Pp Bustanul Hidayah
- lxiii. Lp3h Pp Muslimat Nu
- lxiv. Lp3h Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon
- lxv. Lp3h Universitas Ary Ginanjar
- lxvi. Lp3h Universitas Asahan
- lxvii. Lp3h Universitas Jambi
- lxviii. Lp3h Upt Halal Center Universitas Negeri Padang
- lix. Lp3h Yayasan Islam Janeeta Apria
- lxx. Lp3h Yayasan Pesantren Kewirastaan Daarul Furqan
- lxxi. Lp3h Yayasan Pp Syafi'iyah
- lxxii. Lpnu Jakarta Halal Center
- lxxiii. Lsh Pw Isnu Jatim
- lxxiv. Masyarakat Ekonomi Syariah
- lxxv. Mathla'Ul Anwar
- lxxvi. Mathla'ul Anwar Sinar Gading - Edukasi Halal Indonesia
- lxxvii. P3jph Uin Syarif Hidayatullah Jakarta
- lxxviii. Pcnu Bandar Lampung - Komunitas Halal Indonesia
- lxxix. Pcnu Kabupaten Cianjur
- lxxx. Perkumpulan Wanita Islam
- lxxxi. Persatuan Islam
- lxxxii. Persatuan Islam Sumatera Barat
- lxxxiii. Persatuan Ummat Islam

- lxxxiv. Pesantren Modern Nu Talangpadang
- lxxxv. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat
- lxxxvi. Politeknik Ati Makassar
- lxxxvii. Politeknik Negeri Lampung
- lxxxviii. Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
- lxxxix. Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 Tambak Beras Al-Maliki Bahrul Ulum
 - xc. Pondok Pesantren Daarul Hiraa
 - xc. Pondok Pesantren Darul Amanah
 - xcii. Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cilacap
 - xciii. Ponorogo Halal Center lain Ponorogo
 - xciv. Pusat Bantuan Sertifikasi Hukum Dan Produk Halal Lppm lain Kudus
 - xcv. Pusat Kajian Halal Ldpm
 - xcvi. Pusat Kajian Halal Stai Al-Andina Sukabumi
 - xcvii. Pusat Studi Halal lain Ambon
 - xcviii. Puspelindo (Pusat Pelatihan Indonesia)
 - xcix. Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Ar Risalah Sumatera Barat
 - c. Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto
 - ci. Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia
 - cii. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember
 - ciii. Sekolah Tinggi Teknologi Industri Dan Farmasi
 - civ. Stai Ma'Arif Jambi
 - cv. Stai Miftahul 'Ula Nganjuk Jawa Timur
 - cvi. Taswirotul Ulum
 - cvii. Uin Palopo
 - cviii. Uin Antasari Banjarmasin
 - cix. Uin Imam Bonjol Padang
 - cx. Uin Jurai Siwo Lampung
 - cx. Uin Mahmud Yunus Batusangkar
 - cxii. Uin Maulana Malik Ibrahim
 - cxiii. Uin Raden Fatah Palembang
 - cxiv. Uin Raden Mas Said Surakarta
 - cxv. Uin Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
 - cxvi. Uin Sunan Gunung Djati Bandung
 - cxvii. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

- cxviii. Uin Syekh Wasil Kediri
- cxix. Universitas Airlangga
- cxx. Universitas Aisyah Pringsewu
- cxxi. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
- cxxii. Universitas Andalas
- cxxiii. Universitas Indonesia Halal Center
- cxxiv. Universitas Islam Negeri (Uin) Salatiga
- cxv. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- cxxvi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- cxxvii. Universitas Islam Negeri Mataram
- cxxviii. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
- cxxix. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- cxv. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- cxv. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri
- cxv. Universitas Jember
- cxv. Universitas Jenderal Soedirman
- cxv. Universitas Ma'Arif Lampung
- cxv. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- cxv. Universitas Ma'soem
- cxv. Universitas Muhammadiyah Jakarta
- cxv. Universitas Muhammadiyah Kendari
- cxv. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- cxl. Universitas Muhammadiyah Purworejo
- cxli. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- cxlii. Universitas Mulawarman
- cxliii. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
- cxliv. Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta
- cxlv. Universitas Negeri Surabaya
- cxlvi. Universitas Nusantara Manado
- cxlvii. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
- cxlviii. Universitas Pramita Indonesia
- cxlix. Universitas Sebelas Maret
- cli. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- cli. Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa

- clii. Universitas Wahid Hasyim
- cliii. Wahdah Islamiyah
- cliv. Yayasan Al Muttaqien Care
- clv. Yayasan Al-Falah Tarutung
- clvi. Yayasan Al-Haromain
- clvii. Yayasan Al-Hikmah Khoerunnimah
- clviii. Yayasan Assasutarbiyah
- clix. Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah Kesugihan (Ya Bakii)
- clx. Yayasan Ibadiya Al-Shalihun
- clxi. Yayasan Insan Rabbani Global
- clxii. Yayasan Kyai Haji Jusuf Djunaidi Ash-Shomadi
- clxiii. Yayasan Matahari
- clxiv. Yayasan Nurul Iman Tamansari Bukit Damai
- clxv. Yayasan Paradigma
- clxvi. Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa
- clxvii. Yayasan Pendidikan Dan Sosial Darul Asyraf
- clxviii. Yayasan Pendidikan Islam Al-Basmalah
- clxix. Yayasan Pendidikan Islam Al-Husnayain
- clxx. Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar
- clxxi. Yayasan Pondok Pesantren Darul Aitam Ar-Romli
- clxxii. Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah
- clxxiii. Yayasan Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan
- clxxiv. Yayasan Ponpes Makrojul Ma'aly
- clxxv. Yayasan Rumah Hafidz 368
- clxxvi. Yayasan Sosial Pendidikan Dan Dakwah Islam Robbani
- c) Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH yang meningkat kinerjanya
 - i. Pusat Kajian Halal Universitas Negeri Padang
 - ii. Universitas Trunojoyo Madura
 - iii. Universitas Jenderal Soedirman
 - iv. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
 - v. Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Pendidikan dan Keagamaan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama
 - vi. LPK Nusa Academy
 - vii. Badan Pendidikan dan Pelatihan Ikatan Apoteker Indonesia

viii. LPP JPH Universitas Ary Ginanjar

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 120 lembaga pada akhir tahun 2025. Pada triwulan IV, telah mencapai target sebesar 60% dengan jumlah 120 lembaga JPH yang meningkat kerjanya.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya	Target	0	30%	45%	60%
	Capaian	0	0	0	60%

Pada Triwulan IV tahun 2025, sudah tercapai realisasi dengan capaian kinerja sebesar 60% sesuai dengan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perbandingan capaian triwulan IV sangat meningkat jauh signifikan dibandingkan dengan triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kerjanya.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut:

- evaluasi pembinaan dan rapat koordinasi LPH;
- evaluasi visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH; dan
- pembinaan LP3H, registrasi LP3H, dan registrasi P3H.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- belum tercapainya kesepakatan bersama terkait mekanisme pengukuran kinerja lembaga JPH yang mengalami peningkatan kerjanya; dan

xv. belum dilakukan pembahasan terkait program yang dapat menunjang pengukuran indikator Lembaga JPH yang meningkat kinerjanya.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan evaluasi program dan kinerja bersama internal perencana dan tim pembinaan.

b. Persentase SDM Halal yang Berkompeten

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan IV (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal	b Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%	139 SDM Halal	139 SDM Halal	60%

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Berkompeten

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran dalam penyelenggaraan JPH, yang terdiri dari auditor halal, pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal dan penyelia halal. Sumber Daya Manusia (SDM) halal yang telah dinyatakan kompeten dapat dilihat melalui instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya. Semakin tinggi persentase SDM Halal yang berkompeten maka mencerminkan penyelenggaraan JPH dilakukan secara profesional, akuntabel, dan sesuai standar nasional/internasional. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal. Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja Persentase SDM Halal yang berkompeten telah tercapai realisasi sebesar 139 SDM Halal dengan capaian sebesar 60%.

2) Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten telah ditetapkan target sebesar 60% atau sebanyak 139 SDM Halal pada akhir tahun 2025. Pada triwulan IV, telah tercapai realisasi sebesar 139 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 60%

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV
Target	0	30%	45%	60%

Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	Capaian	0	45,32%	0	60%
--	---------	---	--------	---	-----

Pada Triwulan IV tahun 2025, telah tercapai realisasi dengan capaian kinerja sebesar 60% yang sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 60%. Capaian triwulan IV meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan triwulan II dan triwulan III.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang pencapaian kinerja triwulan IV adalah evaluasi pembinaan auditor halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat instrumen pengukuran persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
- ii. belum dilakukan pembahasan terkait program yang dapat menunjang pengukuran indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan evaluasi program dan kinerja bersama internal perencana dan tim pembinaan.

c. Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target Triwulan IV (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya kesadaran dan	c Persentase daerah yang	90%	53 Kota/ Kabupaten	53 Kota/ Kabupaten	90%

partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal		terlibat gerakan sadar halal				
--	--	------------------------------	--	--	--	--

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Daerah yang Terlibat Gerakan Sadar Halal

Gerakan Sadar Halal adalah suatu inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya produk halal, penerapan sistem Jaminan Produk Halal dan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Gerakan ini diwujudkan melalui kegiatan edukatif, sosialisasi, promosi, dan kolaboratif. Daerah yang terlibat dalam Gerakan Sadar Halal adalah kabupaten/kota di Indonesia yang secara aktif dan nyata berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, atau memfasilitasi kegiatan Gerakan Sadar Halal di wilayahnya. Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin luas jangkauan pelaksanaan gerakan sadar halal di tingkat daerah, sebagai bentuk peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal. Pada Rencana Kinerja Tahunan 2025, telah ditetapkan target indikator kinerja sebesar 90% atau sebanyak 53 Kota/Kabupaten. Pada Triwulan IV Tahun 2025, indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah mencapai realisasi sebanyak 9 kota/kabupaten dengan penambahan realisasi dari triwulan I – triwulan III dengan total sebesar 53 kota/kabupaten. Sehingga, total capaian kinerja triwulan IV sebesar 90%. Pelaksanaan indikator ini dilakukan pada program Gerakan Sadar Halal terhadap :

- a) 1 titik Kota Pekanbaru;
 - b) 3 titik Kota Palembang;
 - c) 1 titik Kota Bengkulu;
 - d) 3 titik Kota Ambon; dan
 - e) 1 titik Kota Jakarta Barat.
- 2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah ditetapkan target sebesar 90% atau sebanyak 53 kota/kabupaten pada akhir tahun 2025. Realisasi

yang telah dicapai pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 53 kota/kabupaten dengan capaian sebesar 90%.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	0	45%	80%	90%
	Capaian	0	42,45%	74,72%	90%

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 90% sudah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 90%. Capaian triwulan IV sudah meningkat secara signifikan dan sesuai dengan target jika dibandingkan dengan triwulan II dan triwulan III.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH untuk memiliki indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV adalah pelaksanaan program Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat. Titik lokasi kota/kabupaten yang dilibatkan program Literasi Sadar Halal bagi Kelompok Masyarakat antara lain sebagai berikut :

- a) 1 titik Kota Pekanbaru;
- b) 3 titik Kota Palembang;
- c) 1 titik Kota Bengkulu;
- d) 3 titik Kota Ambon; dan
- e) 1 titik Kota Jakarta Barat.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. kurang efektifnya koordinasi dengan *stakeholders* eksternal yang mengakibatkan beberapa titik belum terlaksana; dan

- ii. peserta yang bukan pelaku usaha menjadi *output* yang tidak sesuai harapan internal instansi.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melakukan koordinasi dan fiksasi dengan pemangku kepentingan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan serta *output* yang diharapkan secara jelas; dan
- ii. menyusun rencana alternatif dalam perencanaan dan penyesuaian jadwal serta lokasi kegiatan sebagai antisipasi perubahan kedepannya.

Dalam rangka mewujudkan sasaran program, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal telah menetapkan target pada setiap indikator kinerja dalam sasaran kegiatan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Pencapaian indikator kinerja dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pembinaan Lembaga dan SDM JPH

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH	a	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	100 lembaga	101 lembaga	70,7%
	b	Persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	55 kelompok masyarakat	55 kelompok masyarakat	70%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
	c Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	20 lembaga	20 lembaga	70%

a. Persentase Lembaga yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Lembaga yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Lembaga JPH merupakan suatu organisasi atau mitra yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan yang diatur dalam regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jumlah lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan efektivitas program pembinaan dalam meningkatkan literasi JPH dan kapasitas lembaga terkait. Semakin tinggi persentase pemahaman lembaga yang telah terbina menunjukkan bahwa semakin efektif dalam melaksanakan pembinaan JPH. Peningkatan pemahaman ini diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas layanan lembaga JPH secara profesional, kredibel dan sesuai standar yang berlaku.

Capaian indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur melalui jumlah lembaga JPH (Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH) dibagi dengan jumlah lembaga JPH yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Target kinerja untuk indikator persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2025 sebesar 70% atau sebanyak 100 lembaga. Pada Triwulan IV, indikator ini telah direalisasikan sebesar 16 lembaga pada triwulan IV yang ditambah dengan triwulan I – triwulan III sehingga realisasi total sebesar 101 lembaga dengan capaian sebesar 70,7% pada triwulan IV. Capaian ini sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan IV. Realisasi ini diperoleh dari antara lain sebagai berikut :

a) LP3H

Pada triwulan IV sudah dilaksanakan :

- i. pembinaan dan monitoring LP3H pada LP3H IPB dan LP3H Pakuan; dan
- ii. registrasi P3H sebanyak 10.963 P3H.

b) LPH

Pada Triwulan IV telah dilaksanakan Penguatan Peran Serta dan Monitoring Pembinaan LPH sejumlah 2 LPH yang belum berkinerja dan berkinerja rendah dalam hal pemeriksaan kehalalan produk. Terdapat LPH yang meningkat pemahaman setelah dilakukan visitasi monitoring pembinaan LPH yaitu LPH UIN Mataram dan LPH ATQIA.

c) LPP JPH

Pada Triwulan IV sudah dilaksanakan pembinaan kepada LPP JPH melalui Visitasi Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH ke 2 Lembaga, diantaranya UIN Siber Cirebon dan UI Halal Training Center.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 100 lembaga atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025. Realisasi pada triwulan I - triwulan IV sebesar 101 lembaga. Capaian kinerja yang telah dilakukan perhitungan sebesar 70,7% pada triwulan IV yang telah melebihi target sebesar 70% pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk triwulan IV.

3) Perbandingan Target dan Capaian Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	7,70%	47,60%	66,50%	70%
	Capaian	7,70%	47,60%	66,50%	70,7%

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 70,7% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 70%. Capaian triwulan IV lebih besar dari target dan capaian pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) penguatan Peran Serta dan Monitoring Pembinaan terhadap 2 LPH belum berkinerja/ berkinerja rendah;
- b) visitasi lembaga pelaksana pelatihan JPH; dan
- c) pembinaan LP3H, registrasi LP3H, dan registrasi P3H.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum adanya strategi marketing LPH yang tersusun dengan baik;
- ii. pelaksanaan sidang komisi fatwa MUI yang terbatas pada waktu tertentu dan terdapat pungutan biaya di luar sidang fatwa yang harus ditanggung pihak LPH;
- iii. belum tercapainya kesepakatan bersama terkait mekanisme pengukuran lembaga JPH yang mengalami peningkatan pemahamannya; dan
- iv. belum dilakukan pembahasan terkait evaluasi program yang dapat menunjang pengukuran indikator Lembaga JPH yang meningkat pemahamannya.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut antara lain sebagai berikut :

- i. tim pelaksana bina JPH telah mengarahkan agar disusun strategi marketing penawaran jasa pemeriksaan kehalalan kepada pelaku melalui kegiatan sosialisasi, kolaborasi dengan lembaga terkait dan digitalisasi marketing;
- ii. berkoordinasi dengan bagian terkait yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dengan Komisi Fatwa MUI;
- iii. melakukan evaluasi program dan kinerja bersama internal perencanaan dan tim pembinaan.

b. Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, Pendamping Proses Produk Halal (P3H), juru sembelih halal (Juleha) dan penyelia halal. Jumlah SDM yang meningkat pemahamannya menggambarkan jumlah SDM yang memiliki peningkatan pemahaman tentang regulasi, sistem, dan prosedur Jaminan Produk Halal setelah mengikuti pembinaan. Peningkatan pemahaman diukur melalui instrumen penilaian kepada SDM Halal sebelum dan sesudah pembinaan yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembinaan.

Semakin tinggi persentase SDM Halal yang meningkatkan pemahamannya setelah dilakukan pembinaan menunjukkan keberhasilan kegiatan pembinaan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan bahwa SDM Halal semakin profesional dan siap menjalankan tugas penyelenggaraan JPH secara efektif. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 55 kelompok dengan persentase sebesar 70%. Pada Triwulan IV, indikator ini telah mencapai realisasi sebesar 55 kelompok masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 70%. Capaian ini diperoleh dari kegiatan pembinaan terhadap 11 kelompok Juru Sembelih Halal (wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kab. Bogor, Kab. Tangerang, Kota Bekasi, Kab. Bekasi Barat, dan Provinsi Jawa Tengah), 2 kelompok mahasiswa (UIN Mataram dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 6 Penyelia Halal, dan 5 kelompok masyarakat (Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Maluku).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 55 kelompok atau dengan persentase sebesar 70% pada akhir tahun 2025. Realisasi triwulan IV sebesar 55 kelompok masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 70% yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW II	TW IV
-------------------	------	-------	-------	-------

Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Target	5%	17,82%	39,45%	70%
	Capaian	0	17,82%	39,45%	70%

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 70% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 70%. Capaian triwulan IV telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, triwulan II dan triwulan IV, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang meningkat setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) pelaksanaan pelatihan juru sembelih halal;
- b) pelaksanaan pembinaan penyelia halal;
- c) program Literasi Sadar Halal bagi 5 kelompok masyarakat; dan
- d) program edukasi Halal Goes to Campus.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum terdapat penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal yang sesuai bidangnya; dan
- ii. belum terdapat regulasi mengenai pedoman pembinaan dan penilaian kompetensi auditor halal.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. menyusun instrumen penilaian monitoring kompetensi terhadap SDM Halal; dan
- ii. menyusun pedoman pembinaan SDM Halal.

c. Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Meningkatkan Pemahamannya Setelah Dilakukan Pembinaan

Jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan pemahaman terkait kewajiban sertifikasi halal dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mengikuti pembinaan. Semakin tinggi persentase pemahaman Pelaku usaha yang telah terbina menunjukkan bahwa Pelaku Usaha memahami kewajiban sertifikat halal dan dapat menjaga penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Capaian indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan diukur dengan jumlah Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya dibagi dengan jumlah pelaku usaha yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan. Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 20 lembaga dengan persentase sebesar 70%. Pada Triwulan IV, terdapat realisasi sebesar 10 lembaga dengan ditambah dari triwulan I hingga triwulan III tercapai total realisasi sebesar 20 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 70%. Capaian ini diperoleh dari Kegiatan Pembinaan Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha Baznas (1 Lembaga), Pembinaan Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha Dinas Perindustrian Provinsi NTB (1 Lembaga), Pembinaan Jaminan Produk Halal bagi Pelaku Usaha binaan Kementerian Perdagangan (1 Lembaga), Pembinaan Jaminan Produk Halal ke Anggota APPBI DPD Sumsel (1 Lembaga), Pembinaan ke Peyelia Halal Binaan UIN Jakarta, GAPMMI, IHATEC, Mutu Institute, Halal Hero dan Halal Institute (6 Lembaga).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan telah ditetapkan target sebesar 20 lembaga atau dengan persentase 70% pada akhir tahun 2025. Realisasi pada triwulan IV sebesar 10 lembaga dengan ditambah dari triwulan I – triwulan III dengan total realisasi sebesar 20 lembaga, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 70%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja	TW I	TW II	TW III	TW IV
-------------------	------	-------	--------	-------

Persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	Target	21%	21%	45,50%	70%
	Capaian	21%	0	45,50%	70%

Pada Triwulan IV tahun 2025, terjadi peningkatan capaian kinerja jika dibandingkan dengan triwulan I, triwulan II dan triwulan III. Capaian triwulan IV meningkat 24,5% dari triwulan III, sehingga capaian di periode ini meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan triwulan I, triwulan II, dan triwulan III.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Bina Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) Pembinaan JPH bagi Pelaku Usaha Binaan BAZNAS
- b) Pembinaan JPH bagi Pelaku Usaha Binaan Dinas Perindustrian Provinsi NTB
- c) Pembinaan JPH bagi Pelaku Usaha Binaan Kementerian Perdagangan
- d) Pembinaan Jaminan Produk Halal ke Anggota APPBI DPD Sumsel
- e) Pembinaan Penyelia Halal Binaan UIN Jakarta, GAPMMI, IHATEC, Mutu Institute, Halal Hero dan Halal Institute (6 Lembaga).

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. sulit dalam memperoleh kurasi data Pelaku usaha pada Asosiasi maupun Dinas dan lembaga karena belum sepenuhnya terintegrasi dengan OSS BKPM karena penggunaan Aplikasi personal masing-masing daerah;
 - ii. asumsi biaya yang mahal dari Pelaku usaha saat melakukan Pengajuan Sertifikasi Halal; dan
 - iii. perubahan proyeksi anggaran akibat terdapat efisiensi.
- b) Tindak Lanjut Rekomendasi
- Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :
- i. meningkatkan sinergitas dengan dengan Dinas Daerah, Pemda dan Asosiasi Pelaku Usaha dalam memperoleh data terkait binaan Pelaku usaha sesuai dengan masing-masing aplikasi pengembang;
 - ii. memberikan sosialisasi sekaligus edukasi sesuai dengan regulasi; dan
 - iii. menyusun rencana proyeksi anggaran dengan lebih efektif.

2. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025 (%)	Target 2025 (Fisik)	Realisasi Triwulan IV	Capaian Triwulan IV
Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal	a	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	120 lembaga	120 lembaga	100%
	b	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	600 lembaga	600 lembaga	100%
	c	Persentase laboratorium	17%	4 laboratorium	4 laboratorium	17%

		penyelenggara JPH yang memenuhi standar				
	d	Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%	800 SDM Halal	800 SDM Halal	80%
	e	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%	678 pengawas	688 pengawas	76,11%

a. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Lembaga yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Laporan dan temuan hasil pengawasan adalah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap lembaga berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan terhadap lembaga yang telah diterbitkan rekomendasi diukur menggunakan rumus :

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga

B : Jumlah target pengawasan lembaga pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 120 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada Triwulan IV, realisasi tercapai sebesar 120 lembaga yang telah diawasi, dianalisis, dan diterbitkan rekomendasi dengan capaian

kinerja sebesar 100% yang telah melebihi target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal triwulan IV Tahun 2025. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan tindak lanjut aduan dan temu wicara terhadap :

- a) pengawasan terhadap 6 LPH (LPH Surveyor Indonesia, LPH Sucofinso, LPH UIN Walisongo Semarang, LPH Global Halal Indonesia, LPH BSPJI KKP DIY, LPH Kajian Halal Toyiban Muhammadiyah Jakarta) pada bulan Oktober;
- b) pengawasan terhadap 1 LPH (LPH LPPOM MUI) pada bulan November;
- c) pengawasan tindak lanjut aduan terhadap 7 lembaga (Yayasan Ibadiya Al-Shalihun, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, Pesantren Al-Falak (Bogor), Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas asahan, Halal centre Insanul Kamil (Sulawesi Barat), UIN Sunan Kali Jaga, dan Edukasi Wakaf Indonesia (D.I.Y); dan
- d) pengawasan terhadap 19 LP3H (PUSPELINDO (Pusat Pelatihan Indonesia, Yayasan Ibadiya Al-Shalihun, Pusat Kajian Halal LDPM, Halal Center Cendekia Muslim- YPCM, LP3H Salimah, Halal Center Insanul Kamil, Universitas Pramita, Mathla'ul Anwar, Perkumpulan Wanita Islam, Galunggung, Edukasi Wakaf Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Halal Center Inisnu Temanggung, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Halal Center Al Hidayah, Halal Center Al Falah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas asahan, dan Hidayatullah, DKI Jakarta).

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 120 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Pada triwulan IV, telah tercapai realisasi sebesar 120 lembaga yang telah diawasi dengan capaian kinerja yang sesuai dengan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan	Target	24,17%	55,83%	70,83%	100%
	Capaian	24,17%	55,83%	72,50%	100%

diterbitkan rekomendasi					
----------------------------	--	--	--	--	--

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 100% yang telah sesuai dengan target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Capaian triwulan IV telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III, sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) pengawasan terhadap 6 LPH (LPH Surveyor Indonesia, LPH Sucofinso, LPH UIN Walisongo Semarang, LPH Global Halal Indonesia, LPH BSPJI KKP DIY, LPH Kajian Halal Toyiban Muhammadiyah Jakarta) pada bulan Oktober;
- b) pengawasan terhadap 1 LPH (LPH LPPOM MUI) pada bulan November;
- c) pengawasan tindak lanjut aduan terhadap 7 lembaga (Yayasan Ibadiya Al-Shalihun, Kab. Sukabumi, Jawa Barat, Pesantren Al-Falak (Bogor), Universitas Muhammadiyah SUMatra Utara, Universitas asahan, Halal centre Insanul Kamil (Sulawesi Barat), UIN Sunan Kali Jaga, dan Edukasi Wakaf Indonesia (D.I.Y); dan
- d) pengawasan terhadap 19 LP3H (PUSPELINDO (Pusat Pelatihan Indonesia, Yayasan Ibadiya Al-Shalihun, Pusat Kajian Halal LDPM, Halal Center Cendekia Muslim- YPCM, LP3H Salimah, Halal Center Insanul Kamil, Universitas Pramita, Mathla'ul Anwar, Perkumpulan Wanita Islam, Galunggung, Edukasi Wakaf Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Halal Center Inisnu Temanggung, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Halal Center Al Hidayah, Halal Center Al Falah, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas asahan, dan Hidayatullah, DKI Jakarta).

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 adalah belum tersedianya fasilitas pendukung yang memadai bagi pelaku usaha maupun lembaga untuk melaporkan hasil tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh pengawas JPH.

b) Tindak Lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala adalah membangun fitur khusus pada sistem informasi JPH (seperti SIHALAL) sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha dan lembaga untuk mengunggah bukti tindak lanjut. Fasilitas ini harus mencakup formulir input progres perbaikan, ruang unggah dokumen pendukung (foto, sertifikat, atau revisi SOP) dan fitur tanda tangan digital untuk validasi laporan.

b. Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laporan dan Temuan Hasil Pengawasan Pelaku Usaha dan produk yang Dianalisis dan Diterbitkan Rekomendasi

Jumlah laporan dari hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk yang telah dianalisis oleh tim pengawas JPH yang ditugaskan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang tepat. Semakin tinggi persentase laporan yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasinya, maka menunjukkan bahwa proses pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan Produk berjalan efektif dan temuan mendapatkan tindak lanjut yang konstruktif. Capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi yang ditindaklanjuti menggambarkan persentase dari laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk

B : Jumlah target pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 600 lembaga dengan persentase sebesar 100%. Pada Triwulan IV, realisasi tercapai sebesar 600 pelaku usaha dengan capaian kinerja sebesar 100% yang sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 600 pelaku usaha dan 2446 produk yang telah diawasi, dianalisis, dan diterbitkan rekomendasi.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi telah ditetapkan target sebesar 600 lembaga atau dengan persentase sebesar 100% pada akhir tahun 2025. Pada triwulan IV, realisasi sudah mencapai 600 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Target	24,17%	84,67%	88,67%	100%
	Capaian	19,83%	84,67%	88,67%	100%

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 100% yang telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Capaian triwulan IV telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki

indikator kinerja persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) melakukan pengawasan terhadap 600 pelaku usaha; dan
- b) melakukan pengawasan terhadap 2446 produk.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 adalah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh pengawas belum didukung oleh fasilitas pelaporan tindak lanjut yang memadai, sehingga progres perbaikan oleh pelaku usaha tidak dapat terpantau secara optimal.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut adalah membangun fitur khusus pada sistem informasi JPH yang memungkinkan pelaku usaha mengunggah bukti perbaikan (foto, dokumen, atau video) secara mandiri sebagai respon terhadap rekomendasi pengawas.

c. Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Laboratorium Penyelenggara JPH yang Memenuhi Standar

Jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Semakin tinggi persentase laboratorium yang memenuhi standar, menunjukkan bahwa fasilitas laboratorium penyelenggara JPH beroperasi dengan kualitas dan standar yang sesuai. Capaian persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar menggambarkan jumlah laboratorium yang terlibat dalam proses JPH dan telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga memastikan akurasi dan integritas dalam melakukan pengujian produk halal. Pengukuran indikator kinerja tersebut diukur menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah laboratorium penyelenggara JPH yang telah dilakukan pembinaan

B : Jumlah target laboratorium yang dimiliki LPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 4 laboratorium dengan persentase sebesar 17%. Pada Triwulan IV, terdapat 4 laboratorium yang memenuhi standar dengan capaian kinerja sebesar 17% sesuai dengan target yang telah ditetapkan

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar telah ditetapkan target sebesar 4 laboratorium atau dengan persentase sebesar 17% pada akhir tahun 2025. Pada triwulan IV, realisasi laboratorium halal yang memenuhi standar sebesar 4 laboratorium dengan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 17%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	Target	5%	10%	13%	17%
	Capaian	0	0	13%	17%

Pada Triwulan IV tahun 2025, terdapat capaian sebesar 17% yang sesuai dengan target pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 17%. Capaian triwulan IV telah melebihi target dan capaian pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut:

- a) sosialisasi kepada empat laboratorium mitra dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa Laboratorium UIN Jakarta saat ini belum terakreditasi SNI ISO/IEC 17025;
 - b) penerbitan 17 Sertifikat Hasil Uji (SHU) kegiatan Pengujian Alkohol dengan Metode SNI 8965:2021 dan metode inhouse analisis kadar alkohol berbasis teknik headspace dengan Jenis Sampel Yoghurt, sari buah, dan kombucha;
 - c) penerbitan 6 Sertifikat Hasil Uji (SHU) kegiatan Pengujian Alkohol dengan Metode SNI ISO 20224-3:2020 dan SNI 9278:2024 dengan Jenis roti, lempeng, kacang, dan lontong;
 - d) penerbitan 14 Sertifikat Hasil Uji (SHU) kegiatan Pengujian Alkohol dengan Metode inhouse analisis peptida menggunakan LC-HRMS dengan Jenis Sampel Marshmallow;
 - e) pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sistem Pengujian Untuk Mendukung Efektifitas Pengawasan Halal Obat dan Kosmetik Tahun 2026 pada tanggal 17 November 2025 berjumlah ± 40 orang peserta dengan LPPOM dan PPPOMN. Peserta berasal dari PPPOMN, LPPOM, SIG, Lab SBU Sucofindo, BPMSPH, dan Equitrust sebagai narasumber;
 - f) kegiatan Uji Profisiensi LPPOM dan BBSPJIA 5 pada 10 November 2025 dengan Ruang Lingkup Pengujian Alkohol;
 - g) kegiatan Pelatihan Operational Training, and Data Processing (Xcalibur, Freestyle, TraceFinder, and Proteome Discoverer) pada 15–18 Desember 2025 dengan 5 orang peserta;
 - h) penyusunan Draft Pedoman Wajib Uji Lab pada tanggal 11 November 2025. Draft pedoman ini disusun sebagai acuan bagi auditor di LPH dalam melakukan pemeriksaan dengan pengujian lab; dan
 - i) pemeliharaan Alat melalui Kalibrasi terhadap 113 (seratus tiga belas) Instrumen besar untuk analisis protein (HRMS), instrumen besar untuk analisis alkohol (GC-FID), instrumen besar untuk analisis lipid (GC-MS), dan alat-alat laboratorium lainnya.
- 6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi
- a) Kendala
- Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. belum dilakukan pembahasan terkait evaluasi program yang dapat menunjang pengukuran indikator Laboratorium terstandar; dan
- ii. pengembangan Laboratorium LPH yang sesuai dengan standar regulasi yang berlaku masih menghadapi tantangan pada aspek alokasi anggaran investasi peralatan dan penguatan kapasitas SDM karena disebabkan oleh rendahnya jumlah sampel pengujian halal sehingga berdampak pada keterbatasan pendapatan operasional laboratorium.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. melakukan rapat pembahasan terkait evaluasi program yang dapat menunjang pengukuran indikator Laboratorium terstandar; dan
- ii. rancangan Keputusan Kepala Badan tentang jenis produk yang wajib dilakukan pengujian laboratorium sedang dalam proses pembahasan bersama direktorat standar JPH, pakar dan beberapa pihak lain yang terkait.

d. Persentase SDM Halal yang Mematuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase SDM Halal yang Memenuhi Regulasi Penyelenggaraan JPH

SDM Halal merupakan individu yang memiliki peran, tanggung jawab, dan kewenangan dalam sistem penyelenggaraan JPH, termasuk dalam hal pembinaan dan pengawasan JPH yang terdiri dari auditor halal, pendamping (P3H) dan penyelia halal. Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi mencerminkan kedisiplinan dan integritas pelaksanaan regulasi pada penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Semakin tinggi persentase SDM yang mematuhi regulasi, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan JPH semakin baik. Capaian indikator SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah SDM Halal yang mematuhi regulasi

B : Jumlah target SDM Halal yang terawasi pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 800 SDM Halal dengan persentase sebesar 80%. Pada Triwulan IV, realisasi tercapai sebesar 800 SDM

Halal dengan capaian kinerja sebesar 80% yang sudah sesuai dengan target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal. Realisasi ini diperoleh dengan kegiatan pengawasan terhadap 800 pendamping proses produk halal (P3H) dan pengawasan terhadap 43 LP3H.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH telah ditetapkan target sebesar 800 SDM atau dengan persentase sebesar 80% pada akhir tahun 2025. Pada triwulan IV, tercapai realisasi sebesar 800 SDM Halal dengan capaian kinerja sebesar 80%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	Target	14,48%	65,25%	75%	80%
	Capaian	11,90%	52,20%	71,10%.	80%

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 80% telah mencapai target yang telah ditentukan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 80%. Capaian triwulan IV telah melampaui target dan capaian pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase SDM Halal yang memenuhi regulasi penyelenggaraan JPH.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) melakukan Pengawasan terhadap 43 LP3H; dan
- b) melakukan Pengawasan terhadap 800 Pendamping Proses Produk Halal.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja pada Triwulan IV tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

- i. lemahnya koordinasi antara LP3H dan P3H menimbulkan hambatan operasional saat pelaksanaan pengawasan di lapangan; dan
- ii. keterbatasan pemahaman P3H terhadap kriteria SJPH mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut meliputi :

- i. membangun jalur koordinasi formal melalui pertemuan rutin secara bulanan dan kelompok kerja digital antara pengurus LP3H dengan para P3H dengan bertujuan untuk menyelaraskan pembagian wilayah kerja dan jadwal pengawasan guna menghindari hambatan operasional di lapangan; dan
- ii. menyelenggarakan program pelatihan intensif dan penyegaran (*refreshment*) secara berkala mengenai kriteria teknis Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Fokus utama diarahkan pada titik kritis bahan dan standarisasi dokumentasi pendampingan agar seluruh P3H memiliki standar kualitas yang seragam.

e. Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

1) Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengawas JPH yang Mendapat Pembinaan

Pengawas JPH merupakan ASN Jabatan Fungsional (JF) JPH yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan atas pelaksanaan sistem Jaminan Produk Halal, baik usaha, lembaga penyelenggara, maupun produk halal, sesuai standar prosedur dan regulasi teknis yang berlaku. Semakin tinggi persentase pengawas yang memperoleh pembinaan, maka menunjukkan bahwa pembinaan pengawas JPH berjalan secara sistematis dan konsisten untuk menjaga kualitas pengawasan JPH. Capaian indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapatkan pembinaan dihitung menggunakan rumus:

$$(A/B) \times 100\%$$

Keterangan :

A : Jumlah JF Pengawas JPH yang mendapat pembinaan

B : Jumlah JF Pengawas JPH pada tahun berjalan

Pada tahun 2025, terdapat target untuk indikator ini yaitu sebesar 678 Pengawas JPH dengan persentase sebesar 75%. Pada triwulan IV, telah tercapai realisasi sebesar 688 Pengawas JPH dengan capaian sebesar 76,11%. Capaian ini telah melampaui target persentase yang ditetapkan sepanjang tahun 2025. Pelaksanaan indikator ini melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a) penetapan 2 regulasi antara lain sebagai berikut: 1) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 239 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Fungsional Pengawas JPH di Lingkungan BPJPH; dan 2) Penetapan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- b) pelaksanaan 2 kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) pelaksanaan pelatihan JF Pengawas JPH; dan 2) pelaksanaan harmonisasi Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF Pengawas JPH; dan
- c) penyusunan 3 rancangan petunjuk pelaksanaan antara lain sebagai berikut: 1) penyusunan rancangan AD/ART Organisasi Profesi; 2) penyusunan rancangan Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional; dan 3) penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF Pengawas JPH.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan telah ditetapkan target sebesar 678 Pengawas JPH atau dengan persentase sebesar 75% pada akhir tahun 2025, namun realisasi pada Triwulan IV melampaui target yang telah ditetapkan di tahun 2025 yaitu sebesar 688 Pengawas JPH dengan capaian sebesar 76,11%.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Per Triwulan Tahun 2025

Indikator Kinerja		TW I	TW II	TW III	TW IV
Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	Target	10%	30%	73,67%	75%
	Capaian	0	76,11%	76,11%	76,11%

Pada Triwulan IV tahun 2025, capaian sebesar 76,11% telah melampaui target triwulan IV dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar 75%. Capaian triwulan IV telah melampaui target dan capaian pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

4) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya
Indikator ini merupakan indikator baru karena mengingat BPJPH merupakan LPNK yang baru dan penilaiannya baru terlaksana pada tahun 2025. Sehingga, penilaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 menjadi tahun pertama bagi Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal untuk memiliki indikator kinerja persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan.

5) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan IV antara lain sebagai berikut :

- a) penetapan 2 regulasi antara lain sebagai berikut: 1) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 239 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan Fungsional Pengawas JPH di Lingkungan BPJPH; dan 2) Penetapan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- b) pelaksanaan 2 kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) pelaksanaan pelatihan JF Pengawas JPH; dan 2) pelaksanaan harmonisasi Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF Pengawas JPH; dan
- c) penyusunan 3 rancangan petunjuk pelaksanaan antara lain sebagai berikut: 1) penyusunan rancangan AD/ART Organisasi Profesi; 2) penyusunan rancangan Kode Etik Profesi dan Kode Perilaku Jabatan Fungsional; dan 3) penyusunan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis JF Pengawas JPH.

6) Kendala dan Tindak Lanjut Rekomendasi

a) Kendala

Pada triwulan IV, tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja karena mayoritas kegiatan telah dilaksanakan pada triwulan II melalui zoom meeting yang dihadiri 688 peserta.

b) Tindak lanjut Rekomendasi

Tindak lanjut rekomendasi tidak ditetapkan karena tidak terdapat kendala yang dihadapi pada triwulan IV.

B. REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pagu Anggaran tahun 2025 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan setelah dikurangi blokir adalah sebesar Rp 20.015.965.000,- (dua puluh milyar lima belas juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Desember tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp19.707.335.245,- (Sembilan belas miliar tujuh ratus tujuh juta

tiga ratus tiga puluh lima ratus ribu duaratus empat puluh lima rupiah), sehingga capaian anggaran hingga akhir tahun adalah 98.46%, dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;

Periode Desember 2025

Kementerian : 142 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Unit Organisasi : 01 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
Satuan Kerja : 693733 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	20.015.965.000	0	16.481.025.279	3.226.309.966	19.707.335.245	98.46 %	308.629.755
DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	20.015.965.000	0	16.481.025.279	3.226.309.966	19.707.335.245	98.46 %	308.629.755
DC 7161 Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	20.015.965.000	0	16.481.025.279	3.226.309.966	19.707.335.245	98.46 %	308.629.755
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	9.633.186.000	0	7.723.519.714	1.777.038.522	9.500.558.236	98.62 %	132.627.764
QDB 001 Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal	9.633.186.000	0	7.723.519.714	1.777.038.522	9.500.558.236	98.62 %	132.627.764
QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	2.910.385.000	0	2.568.155.480	285.744.446	2.853.899.926	98.06 %	56.485.074
QDC 001 SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal	2.910.385.000	0	2.568.155.480	285.744.446	2.853.899.926	98.06 %	56.485.074
QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7.472.394.000	0	6.189.350.085	1.163.526.908	7.352.877.083	98.40 %	119.516.917
QIC 001 Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	3.483.943.000	0	2.806.179.924	708.210.418	3.394.390.342	97.43 %	89.554.658
QIC 002 SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	3.988.449.000	0	3.383.170.161	375.316.580	3.958.486.741	99.25 %	29.962.259

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada seluruh program dan kegiatan secara umum telah berjalan dengan sangat baik. Capaian realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang terealisasi sebesar 98,46% dari pagu anggaran yang tersedia.

Pada level output, kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga serta Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang optimal dengan realisasi masing-masing di atas 98%. Sementara itu, kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, termasuk output Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal dan SDM Halal yang Mendapatkan Pengawasan JPH, juga menunjukkan kinerja anggaran yang tinggi dengan realisasi mendekati 100%.

Secara keseluruhan, tingginya capaian realisasi anggaran ini mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta pengelolaan anggaran yang optimal dalam mendukung pencapaian sasaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan pada Tahun Anggaran 2025.

C. HIGHLIGHT KINERJA

Highlight Kinerja memuat capaian kinerja lain yang dapat menggambarkan efektivitas pengelolaan Kinerja. Terdapat beberapa program di Direktorat Bina JPH dalam mendukung tugas dan fungsi serta capaian kinerja yang dapat menggambarkan efektivitas program, diantaranya :

1. Penguatan Peran Serta dan Monitoring Lembaga Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Penguatan peran serta dan monitoring Lembaga terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan dalam rangka menjalankan pembinaan jaminan produk halal pada

Lembaga JPH. Pembinaan terhadap Lembaga JPH menjadi hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kapabilitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem tersebut. Pembinaan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat dalam JPH menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Metode yang digunakan pada kegiatan monitoring tersebut adalah monitoring lapangan pada lembaga Jaminan Produk Halal di beberapa provinsi. Pemilihan lokasi didasarkan pada lembaga Jaminan Produk Halal yang sudah teregistrasi maupun bekerja sama dengan BPJPH dan belum dilakukan monitoring sebelumnya. Lembaga JPH yang dilakukan monitoring sejumlah 12 Lembaga JPH, diantaranya :

- a) LPH Arham
 - b) LPH Pharma Halal Center
 - c) LPH Arsy Indonesia
 - d) LPH YARSI
 - e) LPH Universitas Padjadjaran
 - f) LPP JPH PT. Halalin Akademi Center
 - g) LPP JPH Forestcitra Sejahtera
 - h) LPP JPH IHATEC
 - i) LPP JPH Great Edu
 - j) LPP JPH Halal Institute
 - k) LPP JPH UIN Maulana Malik Ibrahim
 - l) LPP JPH HC Ahmad Dahlan
2. Pelatihan Juru Sembelih Halal

Pelatihan Juru Sembelih Halal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan bagi juru sembelih halal. Dalam hal ini, Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH memiliki peran dan tanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pelatihan. Dengan demikian, harapan dari kegiatan pelatihan ini adalah juru sembelih halal dapat melakukan penyembelihan sesuai SKKNI yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 147 tahun 2022 sehingga menghasilkan proses penyembelihan sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Dengan pembinaan yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk halal di Indonesia, menjaga integritas sistem pengawasan, serta membangun kepercayaan masyarakat

terhadap produk halal yang beredar di pasar. Kegiatan Pelatihan Juru Sembelih Halal dilakukan pada 11 kelompok Juru Sembelih Halal di wilayah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Tengah.

3. Pembinaan dan Monitoring LP3H

Pembinaan dan monitoring LP3H dilakukan kepada 29 LP3H namun belum dilakukan evaluasi peningkatan pemahaman LP3H yaitu, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Ittihadul Muballighin Wal Muballighat, LP3H Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Halal Center, Halal Hub Yayasan Pinbuk Indonesia, Institut Agama Islam Sahid, Yayasan Kyai Haji Jusuf Djunaidi Ash-Shomadi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, Pesantren Al – Falak, Universitas Swadya Gunung Jati Cirebon, Pondok Pesantren Al Falah, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Halal Center Qur'Ani A-Syarichin, Universitas PGRI Argopuro Jember, LP3H Madiq Riyadlul Qori'in, Halal Center Al Hidayah, Yayasan Pondok Pesantren Mabadi'ul Ihsan, STEBIA Al-Rosyid Bojonegoro, Halal Center Yayasan Widya Gara, Universitas Internasional Semen Indonesia, Halal Center Bahrul Maghfiroh (Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia), Universitas Cordova, Pesantren Khairul Ummah, Politeknik ATI Makassar, Universitas Muhammadiyah Palopo, Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari, Yayasan Pendidikan Islam Al-Basmalah, Universitas Aisyah Pringsewu, STIS Al Wafa.

4. Registrasi dan Pembinaan Calon LP3H

Registrasi dan Pembinaan Calon LP3H dilakukan pada 16 calon LP3H baru namun belum dilakukan evaluasi peningkatan pemahaman LP3H yaitu, Universitas Padjadjaran, STAI Miftahul 'Ula Nganjuk Jawa Timur, Halal Center Yayasan KBLS Hodijah Cianjur, Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa, Institut Daarul Qur'an Jakarta, Yayasan Asasutarbiyah, Universitas Panca Sakti Bekasi, Universitas Siliwangi, Halal Center Yayasan Anwarul Hidayah (YAHIDA), Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta, Institut Agama Islam Bakti Negara (IBN) Tegal, Universitas Khairun, Universitas Bina Niaga Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Jaringan Halal Indonesia JPRMI Bukittinggi, Universitas Sunan Gresik.

5. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal

Pelatihan bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H) telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pelatihan mandiri yang diselenggarakan oleh LP3H dan pelatihan berbasis Learning Management System (LMS) yang difasilitasi oleh BPJPH. Kedua metode ini telah berjalan sejak tahun sebelumnya dan terus dilanjutkan pada tahun 2025 sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas P3H. Berikut ini rekapitulasi pelatihan P3H di tiap lembaga, diantaranya :

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
1	AL BAITUL IZZAH	227
2	Al Jam'iyatul Washliyah	134
3	AL MUHAJIRIN AL HAKIM	283
4	As-Syafi'iyah Halal Center	686
5	Datokarama Halal Center	33
6	Edukasi Wakaf Indonesia	6631
7	FATAYAT NU PROV KALTARA	26
8	Forum Zakat	152
9	GP ANSOR LAMPUNG	345
10	HALAL CENTER QUR'ANI A-SYARICHIN	21
11	Halal Center Al Hidayah	56
12	HALAL CENTER AL-FURQON	100
13	HALAL CENTER AL-RAUDAH	137
14	Halal Center Cendekia Muslim - YPCM	1
15	Halal Center IAIN Kendari	69
16	Halal Center IAIN Pontianak	133
17	HALAL CENTER INISNU	88
18	HALAL CENTER INSANUL KAMIL	431
19	HALAL CENTER LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL HIDAYAH	64
20	Halal Center PCNU Depok	9
21	HALAL CENTER POLITEKNIK AKA BOGOR	265
22	HALAL CENTER PONDOK PESANTREN ALHAMDULILLAH GEGER KEDUNGADEM BOJONEGORO	56
23	Halal Center Salimah	351
24	Halal Center UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	370
25	HALAL CENTER UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	55
26	Halal Center Universitas Islam Balitar Blitar	42

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
27	Halal Center Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP)	145
28	Halal Center Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS)	127
29	HALAL CENTER YAYASAN ANWARUL HIDAYAH (YAHIDA)	231
30	HALAL CENTER YAYASAN KBLS HODIJAH CIANJUR	372
31	Halal Center Yayasan Widya Gara	18
32	Halal Centre Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	17
33	Halal Hero Ibnu Chaldun	470
34	Halal Hub Pinbuk Indonesia	60
35	HC UMS RAPPANG	28
36	IAI An-Nadwah Kuala Tungkal	40
37	IAIN BONE	89
38	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	16
39	IAIN PALANGKARAYA	120
40	IAIN TERNATE	18
41	Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia	1188
42	IKATAN PONDOK PESANTREN INDONESIA	375
43	Institut Agama Islam As-Siddiq Kie Raha Maluku Utara	21
44	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura	1
45	Institut Sains dan Teknologi Nasional	117
46	Institut Teknologi Kalimantan	38
47	Institut Teknologi Sumatera	1300
48	ITTIHADUL MUBAHLIGHIN WAL MUBALLIGHAT	28
49	KHUTOBA INDONESIA	18
50	Lembaga Pendamping PPH Halal Center Universitas Negeri Malang	1
51	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Universitas Muhammadiyah Magelang	31
52	Lembaga PPH Halal Center Syarikat Islam	292
53	LP3H BPSH KAHMI	103

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
54	LP3H - HALAL CENTER UNIVERSITAS DARUNNAJAH	4
55	LP3H AL ITTIHADYAH	33
56	LP3H Galunggung	260
57	LP3H Hidayatullah	633
58	LP3H IAI Miftahul Ulum Lumajang	64
59	LP3H IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	132
60	LP3H LIFE SKILL DAARUN NAJAAH	60
61	LP3H MADIQ RIYADLUL QORI'IN	26
62	LP3H PP Bustanul Hidayah	6
63	LP3H PP MUSLIMAT NU	105
64	LP3H UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	194
65	LP3H UNIVERSITAS ARY GINANJAR	1143
66	LP3H UNIVERSITAS ASAHAN	133
67	LP3H Universitas Jambi	242
68	LP3H UPT Halal Center Universitas Negeri Padang	5
69	LP3H Yayasan Islam Janeeta Apria	4
70	LP3H Yayasan Pesantren Kewirastaan Daarul Furqan	25
71	LP3H Yayasan PP Syafi'iyah	40
72	LPNU Jakarta Halal Center	34
73	LSH PW ISNU JATIM	455
74	Masyarakat Ekonomi Syariah	322
75	Mathla'ul Anwar	1679
76	MATHLA'UL ANWAR SINAR GADING - EDUKASI HALAL INDONESIA	2
77	P3JPH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	50
78	PCNU Bandar Lampung - Komunitas Halal Indonesia	54
79	PCNU KABUPATEN CIANJUR	340
80	Perkumpulan Wanita Islam	727
81	Persatuan Islam	85
82	Persatuan Islam Sumatera Barat	432

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
83	Persatuan Ummat Islam	2
84	Pesantren Modern NU Talangpadang	43
85	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat	538
86	Politeknik ATI Makassar	41
87	POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG	44
88	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	30
89	Pondok Pesantren Al-Muhajirin 3 Tambak Beras Al-Maliki Bahrul Ulum	30
90	Pondok Pesantren Daarul Hiraa	60
91	Pondok Pesantren Darul Amanah	23
92	Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cilacap	36
93	Ponorogo Halal Center IAIN Ponorogo	61
94	PUSAT BANTUAN SERTIFIKASI HUKUM DAN PRODUK HALAL LPPM IAIN KUDUS	89
95	Pusat Kajian Halal LDPM	1150
96	PUSAT KAJIAN HALAL STAI AL-ANDINA SUKABUMI	13
97	Pusat Studi Halal IAIN Ambon	31
98	PUSPELINDO (Pusat Pelatihan Indonesia)	233
99	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar Risalah Sumatera Barat	29
100	Sekolah Tinggi Agama Islam Sabilul Muttaqin Mojokerto	4
101	Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia	3
102	SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH NURUL QARNAIN JEMBER	25
103	Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi	9
104	stai ma'arif jambi	5
105	STAI MIFTAHUL 'ULA NGANJUK JAWA TIMUR	5
106	TASWIROTUL ULUM	67
107	UIN Palopo	11
108	UIN ANTASARI BANJARMASIN	1
109	UIN Imam Bonjol Padang	118
110	UIN Jurai Siwo Lampung	72

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
111	UIN Mahmud Yunus Batusangkar	41
112	UIN Maulana Malik Ibrahim	43
113	UIN Raden Fatah Palembang	129
114	UIN Raden Mas Said Surakarta	77
115	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	1
116	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	1222
117	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	395
118	UIN Syekh Wasil Kediri	73
119	Universitas Airlangga	109
120	Universitas Aisyah Pringsewu	17
121	Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta	41
122	UNIVERSITAS ANDALAS	269
123	Universitas Indonesia Halal Center	73
124	Universitas Islam Negeri (UIN) SALATIGA	252
125	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	7
126	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	25
127	Universitas Islam Negeri Mataram	6
128	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	150
129	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	246
130	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	383
131	UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI	28
132	Universitas Jember	176
133	Universitas Jenderal Soedirman	82
134	UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG	13
135	Universitas Maritim Raja Ali Haji	4
136	Universitas Ma'soem	62
137	Universitas Muhammadiyah Jakarta	10
138	Universitas Muhammadiyah Kendari	27
139	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	54

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
140	Universitas Muhammadiyah Purworejo	49
141	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	7
142	Universitas Mulawarman	2
143	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA	71
144	Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta	99
145	Universitas Negeri Surabaya	82
146	UNIVERSITAS NUSANTARA MANADO	6
147	Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum	3
148	Universitas Pramita Indonesia	1
149	Universitas Sebelas Maret	61
150	UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA	44
151	Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa	12
152	Universitas Wahid Hasyim	189
153	Wahdah Islamiyah	96
154	Yayasan Al Muttaqien Care	163
155	YAYASAN AL-FALAH TARUTUNG	82
156	Yayasan Al-Haromain	142
157	Yayasan Al-hikmah Khoerunnimah	92
158	Yayasan AsSasutarbiyah	237
159	Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah Kesugihan (Ya BAKIL)	84
160	Yayasan Ibadiya Al-Shalihun	662
161	YAYASAN INSAN RABBANI GLOBAL	229
162	Yayasan Kyai Haji Jusuf Djunaidi Ash-Shomadi	29
163	Yayasan Matahari	841
164	YAYASAN NURUL IMAN TAMANSARI BUKIT DAMAI	69
165	Yayasan Paradigma	86
166	YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN DOA BANGSA	235
167	Yayasan Pendidikan dan Sosial Darul Asyraf	101
168	Yayasan pendidikan Islam Al-Basmalah	5

No	Nama LP3H	Jumlah Pendamping Lulus
169	Yayasan Pendidikan Islam Al-Husnayain	26
170	Yayasan Pendidikan Islam Mathla'ul Anwar	1
171	Yayasan Pondok Pesantren Darul Aitam Ar-Romli	217
172	Yayasan Pondok Pesantren Darul Falah	24
173	YAYASAN PONDOK PESANTREN MABADI'UL IHSAN	10
174	Yayasan Ponpes Makrojul Ma'aly	91
175	YAYASAN RUMAH HAFIDZ 368	24
176	YAYASAN SOSIAL PENDIDIKAN DAN DAKWAH ISLAM ROBBANI	162
	TOTAL	34440

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2025 Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) sasaran program. Sasaran program meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 2 (dua) indikator kinerja. Indikator kinerja persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti merupakan satu-satunya indikator yang memperoleh capaian kinerja 100% atau masuk ke dalam kategori SANGAT BAIK, namun untuk indikator lainnya masih berada di bawah target yang ditentukan. Sasaran program meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal memiliki 3 (tiga) indikator kinerja. Indikator kinerja persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya sudah memiliki realisasi yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu 120 lembaga dengan capaian kinerja sebesar 60%. Indikator kinerja persentase SDM Halal yang berkompeten telah memiliki realisasi yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 139 SDM Halal dengan capaian sebesar 60%. Indikator kinerja persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal telah memiliki realisasi yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 53 Kota/Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 90%.

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya pembinaan Lembaga dan SDM JPH dengan 3 (tiga) indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

1. indikator kinerja berupa persentase lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 70,7% yang melebihi target tahun 2025 yaitu sebesar 70%;
2. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 70% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 70%; dan
3. indikator kinerja berupa persentase pelaku usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 70% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 70%.

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal dengan 5 (lima) indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

6. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 100%;
7. indikator kinerja berupa persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi memperoleh capaian kinerja sebesar 100% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 100%;
8. indikator kinerja berupa persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar sudah terdapat realisasi sehingga capaian kinerjanya sebesar 17% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 17%;
9. indikator kinerja berupa persentase SDM Halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH memperoleh capaian kinerja sebesar 80% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 80%; dan
10. indikator kinerja berupa persentase pengawas JPH yang mendapat pembinaan memperoleh capaian kinerja sebesar 76,11% yang sesuai dengan target tahun 2025 yaitu sebesar 76,11%.

Mayoritas realisasi dan capaian dari indikator kinerja dari Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal pada triwulan IV tahun 2025 telah melampaui target yang telah ditentukan dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.